

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Ali, M. 2021. *Viktimologi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Candra Perbawati. 2019. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Bandar Lampung: AURA.
- Danimunthe, F. Z., dan Heru Susetyo. 2019. *Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Djafar, W. 2015. *Memastikan Perlindungan Hak atas Privasi di Era Digital*. Jakarta: Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Djafar, W., dan Asep Komarudin. 2014. *Perlindungan Hak atas Privasi di Intenet*. Jakarta: Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Djafar, W., dkk. 2018. *Hak Atas Penghapusan Informasi di Indonesia: Orisinalitas dan Tantangan dalam Penerapannya*. Jakarta: LBH PERS.
- Efendi, J., dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Friedman, L. M. 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. (terjemahan M. Khozim). Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Cooper. 2016. *Hak Atas Penghapusan Informasi (Right To Be Forgotten) dan Kebebasan Berekspresi: Pertarungan Wacana*. Jakarta: Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Goleman, D. 2015. *Emotional Intelligence: Kecerdasan Emosional* (terjemahan T. Hermaya). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Irianti, S. 2006. *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kenedi, J. 2020. *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kusuma, E., & Arum. N. S. 2019. *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan*. Denpasar: Southeast Asia Freedom of Expression Network.
- Mangku, D. G. S. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Rahman, R. A., dkk. 2024. *Buku Data Statistik Aplikasi Informasika Tahun 2023*. Jakarta: Aptika Kominfo.
- Rasjidi, Lili., & I.B Wysa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya.

- Ridwa, A. I., dkk. 2020. *Pedoman Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Untuk Memperkuat Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico.
- Sinaga, D. 2023. *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*. Jakarta: UKI Press.
- Soeroso, R. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sriwidodo, J. 2020. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Wahid, A., & Muhammad I. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Wibowo, K. T., & W. Anjari. 2022. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: KENCANA.
- Yulia, R. 2013. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

ARTIKEL DALAM JURNAL

- Azhar, J., dkk. (2023). "Kekerasan Seksual" Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban". *Share: Social Work Journal*, Volume 13, Nomor 1 (hlm. 82-91).
- Arndarnijariah, F. R. (2023). "The Right To Be Forgotten Sebagai Hukum Perlindungan Data Pribadi Korban Revenge Porn". *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 1 (hlm. 69-82).
- Crishtianto, Hwian. (2020). "Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban *Revenge Porn* Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *MIMBAR HUKUM*, Volume 32, Nomor 2 (hlm. 175-192).
- Destriannisya, A. (2024). "Analisis Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) dan Regulasinya di Indonesia". *Journal of Contemporary Law Studies*, Volume 2, Nomor 2 (hlm. 115-128).
- Dewi, A. (2022). "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, Volume 1, Nomor 1 (hlm 45-57).
- Faridah, Siti. (2019). "Lemahnya Penegakan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas". *Lex Scientia Law Review*, Volume 3, Nomor 1 (hlm. 15-30).
- Hidayatullah, C. (2023). "Jenis dan Dampak Cyber Crime". *Prosiding SAINTEK: Sains dan Teknologi*, Volume 2, Nomor 1 (hlm. 216-221).
- Haidar, G., & Apsari, N. C. (2020). "Pornografi Pada Kalangan Remaja". *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 7, Nomor 1 (hlm. 136-143).
- Herman., dkk. (2024). "Penggunaan Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan UU ITE". *Halu Oleo Legal Research*, Volume 6, Nomor 2 (hlm. 588-603).

- Kang, C. (2021). Urgensi Pengesahan RUU PKS Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban *Revenge Porn*. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, Volume 24, Nomor 1 (hlm. 49-62).
- Kartika. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Wasaka Hukum*, Volume 9, Nomor 2 (hlm. 300-324).
- Lubis, N. S., & Muhammad Irwan P. N. (2023). "Perkembangan Teknologi Informasi Dan Dampaknya Pada Masyarakat". *Kohesi: Jurnal Multidisiplin Saintek*, Volume 1, Nomor 12 (hlm.1-13).
- Mauliddina., dkk. (2024). "*Revenge Porn* dan Dampak Psikologis Pada Korban: Kajian Psikologis dan Tinjauan Singkat Hukum". *Ranag Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Volume 7, Nomor 1 (hlm. 367-375).
- Mulyadi., dkk. (2024). "*Revenge Porn* Ditinjau Dari Sudut Pandang Yuridis Indonesia". *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Volume 2, Nomor 10 (hlm. 77-87).
- Nurtjahyo, Lidwina. I. (2024). "Dinding Rapuh Pelindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis *Digital The Fragile Walls of Digital Sexual Violence Victims' Protection*". *Jurnal Perempuan*, Volume 29, Nomor 2 (hlm. 31-45).
- Pakaya, N., dkk. (2024). "Upaya Penanggulangan Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial". *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Volume 1, Nomor 2 (hlm. 10-24).
- Pangesti, A. A. (2024). "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana *Revenge Porn*". *ALETHEA Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 2 (hlm. 97-113).
- Pangestuti, E. (2018). "Tinjauan Viktimologis Terhadap Kekerasan Psikis Pada Pembantu Rumah Tangga". *Yustitiabelen*, Volume 4, Nomor 1 (hlm. 27-49).
- Prayoga, D. A., dkk. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional". *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasiona*, Volume 2, Nomor 2 (hlm. 188-200).
- Purba, Yuliana B. Y. (2023). "Perlindungan Hukum Bagi Korban *Revenge Porn* Dalam Yuridiksi Virtual Berdasarkan Hukum Di Indonesia". *Jurnal Sosial Dan Sains*, Volume 3, Nomor 11 (hlm. 1219-1227).
- Ridwan., dkk. (2024). "Pentingnya Pendampingan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kebutuhan Dan Keharusan Hukum Pidana". *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 2 (hlm. 352-368).
- Samuel., dkk. (2024). "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Restitusi Korban Kekerasan Seksual". *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Volume 2, Nomor 3 (hlm. 413-426).
- Saputra, M. F. N. S., dkk. (2024). "Kajian Viktimologi Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Kepolisian

- Resor Kota Palu”. *JIHAK Jurnal Ilmu Hukum Aktualita Fakultas Hukum Universitas Tadulako*, Volume 1, Nomor 3 (hlm. 233-238).
- Setiawan, D. (2018). “Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Budaya”. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, Volume 4, Nomor 1 (hlm. 62-72).
- Siagian, J. P., & Mitro. S. (2024). “Perempuan Sebagai Kelompok Rentan”. *Jurnal Educatio*, Volume 10, Nomor 1 (hlm. 173-178).
- Siregar, D. B., dkk. (2023). “Dampak Reviktimisasi Terhadap Penyintas Kekerasan Seksual Dalam Proses Penyidikan”. *PATTIMURA Law Study Review*, Volume 1, Nomor 1 (hlm. 20-28).
- Suhandi, R. W. W., dkk. (2024). “*Revenge Porn* Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Ditinjau Berdasarkan Teori Hukum Pidana”. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Volume 2, Nomor 1 (hlm. 118-132).
- Tanasale, C., dkk. (2023). “Peran Korban Pemerkosaan Dalam Membantu Proses Penyidikan”. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1 (hlm. 94-99).
- Tantri, L. M. K. W. (2021). “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual”. *Media Iuris*, Volume 4, Nomor 2 (hlm. 145-172).

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

- Adkiras, Fadhilah. 2023. *Right To Be Forgotten Sebagai Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE)*. Tesis (diterbitkan). Program Studi Hukum Program Magister, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Dharmawan, Adi. 2020. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam)*. Skripsi (diterbitkan). Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.
- Santoso, Ivan Joko. 2021. *Tindak Pidana Revenge Porn Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Skripsi (diterbitkan). Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4429).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4171).
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 182, 8 Halaman)
- Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/740/V/2024 Tanggal 8 Mei 2024 Tentang Pembentukan Organisasi Direktorat Reserse Kepolisian Daerah Bali.

INTERNET

- Bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Kepolisian Daerah Bali. (2025). Tentang Polri. *Bali*: Polda Bali News Situs Resmi Kepolisian Daerah Bali. Tersedia pada <https://www.bali.polri.go.id/profile/view/prfl-195551-tentang-polri> (diakses pada 10 Maret 2025).
- Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Digital. (2025). Siaran Pers No. No. 41/HM-KKD/03/2025: Apresiasi Laporan Masyarakat, Komdigi Tangani 1,3 Juta Konten Pornografi Dan Judi Online. Tersedia pada: <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/41/> (diakses pada 11 Maret 2025).
- Komnas Perempuan. (2024). Modul Dukungan Psikologis Awal Berspektif HAM Dan Gender Dalam Penanganan Penyintas Kekerasan Berbasis Gender. *Jakarta*: Pengetahuan dan Publikasi Komnas Perempuan. Tersedia pada <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1182> (diakses pada 12 November 2024).
- Komnas Perempuan. (2024). Momentum Perubahan Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan (Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2023).

Jakarta: Pengetahuan dan Publikasi Komnas Perempuan. Tersedia pada <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1115> (diakses pada 16 September 2024).

Komnas Perempuan. (2023). Kertas Kebijakan Saran dan Masukan Komnas Perempuan terhadap RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jakarta: Pengetahuan dan Publikasi Komnas Perempuan.* Tersedia pada <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1000> (diakses pada 16 September 2024).

Pemerintah Provinsi Bali. (2019). Profil Pemerintah Provinsi Bali. *Bali: Pemerintah Provinsi Bali.* Tersedia pada <https://www.baliprov.go.id/web/profil-pemerintah-provinsi-bali/> (diakses pada 10 Maret 2025).

Yofira, A., dkk. (2023). Southeast Asia Freedom of Expression Network-SAFEnet: Kertas Kebijakan Urgensi Pengaturan Penghapusan Konten Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Yang Berpihak Pada Pemenuhan Hak Korban. Tersedia pada: <https://mega.nz/file/SAFEnet/Kertas/Kebijakan/> (diakses pada 11 Maret 2025).

